

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja, dan Na'a, Suprin, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Attamimi, A. Hamid. S, 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, dan Nazriyah, R, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-hill, Jakarta.
- Manan, Bagir, dan Magnar, Kuntana, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Natabaya, H.A.S., 2008, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soekanto, Soerjono, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Minto, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, Grasindo, Jakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sumarsono, S., 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta.

Vlies, Van der, I.C., 1984, *Het wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasil Penelitian, Tesis, Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah:

4th Indonesia Anti-Corruption Forum, 2014, "Implementasi dan Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal*, Jakarta.

Attamimi, A. Hamid. S, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1 - Pelita 4", *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Wicaksono, Dian Agung, 2013, "Rekonstruksi Pilar Kerangka Hukum Dalam Strategi Nasional REDD+ Untuk Mewujudkan Eko-Konstitusionalisme di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/6262/SJ tentang hal evaluasi hasil Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan pada bulan September (B09) tahun 2014.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/6336/SJ tentang Realisasi Pencapaian AD-PPK Pemerintah Daerah Pada Bulan September (B09) Tahun 2014.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet:

Aris Herdis, (2016, 21 Desember), "Berharap dari 52 Pulau Anti Korupsi", Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [Online], diakses dari <https://www.menpan.go.id/berita-terkini/6144-berharap-dari-52-pulau-anti-korupsi>.

Dadang Trisasongko, (2017, 27 Januari) "Dadang Sasongko Dalam Peluncuran CPI 2016", Transparency International Indonesia [Online], diakses dari http://www.ti.or.id/index.php/statement/2017/01/27/dadang-trisasongko-dalam-Peluncu_ranpci_2016.

Dewan Perwakilan Rakyat, "Program Legislasi Nasional", diakses dari <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/10>.

Fathan Qorib, "Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia", diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4daeb43d3eee3/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia>.

Sandi Indra Pratama, (2016, 11 Agustus), KPK: Sebanyak 361 Kepala Daerah di Indonesia Terlibat Korupsi [Online], diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ab0e2661577/kpk--sebanyak-361-kepala-daerah-di-indonesia-terlibat-korupsi>.

Transparency International, "Corruption Perceptions Index", diakses dari <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>.